

## Akar Penyebab Kemiskinan Petani Hortikultura di Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung

**Tubagus Hasanuddin, Dame Trully G dan Teguh Endaryanto**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Korespondensi: tb\_sijati@yahoo.com

### ABSTRACT

#### **The origins of horticultural farmers poverty in Tanggamus, Lampung Province**

The issue of poverty is still a fundamental problem of Indonesian development. Government programs in poverty alleviation is less successful so that the programs should be evaluated. Research objectives were to 1) identify the level and the cause of horticultural farmers poverty as well as their economic behavior to face the poverty, 2) asses the performance of economic enterprises, financial institutions and social institutions of horticulture farmers, and 3) formulate a model of horticultural farmer empowerment. Research carried out in the area of horticultural production centers in the Tanggamus District Lampung determined by purposive sampling. Respondents and the number of respondents were determined by using the snowball sampling technique to the extent "redundancy". Research method was participating observation, while data collection techniques was in-depth interviews and focus group discussion. Data analysis was carried out by using qualitative data and SWOT Analysis. The results showed that horticultural farmers were poor and very poor due to limited land and capital. The quality of human resources was low and they were consumptive. Farmers anticipated their poverty by job diversification and maintaining good relationship among each other. Either economic or financial institutions were still controlled by outsiders, and their social institutions were still dysfunctions. Suggested empowerment model of horticultural farmers was increasing knowledge and skills, providing the capital, forming a marketing institution by the government, strengthening extension and changing farmer's lifestyle and attitude.

Key words: Farmer, Horticulture, Poverty.

### ABSTRAK

Isu kemiskinan merupakan masalah penting dalam pembangunan di Indonesia. Beberapa program pemerintah belum mampu mengatasi kemiskinan sehingga perlu dirumuskan model pemberdayaan masyarakat miskin yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi tingkat dan penyebab kemiskinan petani hortikultura serta pola perilaku ekonomi petani dalam menghadapi kemiskinan, 2) mengkaji kinerja usaha ekonomi, lembaga keuangan dan lembaga sosial petani hortikultura, dan 3) merumuskan model pemberdayaan petani hortikultura. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di sentra produksi hortikultura di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Responden dan jumlah responden ditentukan dengan teknik *snowball sampling* sampai pada taraf *redudancy*. Metode penelitian adalah metode pengamatan berpartisipasi dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif serta SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani hortikultura masih miskin dan sangat miskin karena lahan sempit dan keterbatasan modal. Sumberdaya manusia petani hortikultura masih rendah dan pola hidup petani hortikultura bersifat konsumtif. Petani hortikultura mengantisipasi kemiskinan dengan diversifikasi

pekerjaan dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Lembaga ekonomi dan keuangan masih dikuasai oleh pihak luar petani, sedangkan lembaga sosial petani masih belum banyak berfungsi. Model pemberdayaan yang dianjurkan untuk petani hortikultura adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, kemudahan permodalan, pembentukan lembaga pemasaran yang ditentukan oleh pemerintah, pendampingan dan perubahan pola hidup dan sikap petani.

Kata kunci: Petani, Hortikultura, Kemiskinan.

**PENDAHULUAN**

Isu kemiskinan masih merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sehingga pembangunan belum mampu berfungsi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sumodiningrat, 2003). Pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 17,75 % dibandingkan tiga tahun sebelumnya dan peningkatan terbesar terdapat di daerah pedesaan sebesar 21,81 %. Program penanggulangan kemiskinan belum mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, termasuk di Propinsi Lampung.

Pada tahun 2007, jumlah keluarga miskin di Propinsi Lampung sebanyak 785.000 KK. Jika satu keluarga berjumlah empat orang, maka penduduk Lampung yang miskin adalah 3,14 juta orang. Angka kemiskinan tersebut cukup tinggi apalagi 45 % desa atau 765 desa di Lampung termasuk juga kategori

desa miskin. Berdasarkan angka di atas, Badan Pusat Statistik Lampung menyebutkan bahwa Propinsi Lampung kini menjadi propinsi termiskin ke dua di Indonesia bagian barat setelah Nangroe Aceh Darussalam. Hal ini sangat ironis jika dilihat bahwa Propinsi Lampung yang terletak di pintu gerbang Pulau Sumatera dan dekat dengan pusat kekuasaan seharusnya menjadi sebuah propinsi yang berkembang dan maju di segala bidang, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Tabel 1 berikut ini memperlihatkan tingkat kemiskinan di Propinsi Lampung tahun 2006. Kabupaten Tanggamus sebagai produksi hortikultura ternyata masih memiliki jumlah masyarakat miskin yang cukup besar.

Sumber kemiskinan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab kemiskinan absolut dan struktural. Kemiskinan absolut terjadi karena proses pemiskinan, misalnya karena faktor ekonomi. Sebaliknya kemiskinan yang

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Propinsi Lampung tahun 2006

No.	Kabupaten	Hasil Tahapan Pra Sejahtera (KK)	Keluarga Sejahtera Sejahtera I (KK)	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1.	Lampung Selatan	102.999	49.698	152.697
2.	Lampung Tengah	85.350	77.555	162.905
3.	Lampung Utara	63.458	40.039	103.497
4.	Bandar Lampung	61.480	39.494	100.974
5.	Lampung Barat	36.328	27.897	64.225
6.	Tulang Bawang	83.987	86.426	170.413
<b>7.</b>	<b>Tanggamus</b>	<b>90.838</b>	<b>51.324</b>	<b>142.162</b>
8.	Metro	5.503	5.313	10.816
9.	Lampung timur	89.079	62.108	151.187
10.	Way kanan	55.748	24.873	80.621
11.	Pesawaran	44.321	19.369	63.690
	Jumlah	719.091	484.096	1.203.187

Sumber: Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2006

struktural erat kaitannya dengan masalah budaya kemiskinan (Soekartawi, 1996). Di pihak lain, Suharto (1997) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Indikator kemiskinan absolut diukur dari batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*poverty line*) baik berupa indikator tunggal maupun komposit seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau beberapa kombinasi dari indikator itu (Suharto, 1997). Untuk mempermudah pengukuran, indikator itu umumnya dikonversikan dalam bentuk uang baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran. Kemiskinan relatif adalah keadaan kemiskinan yang dialami individu dan kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai orientasi sosial budaya atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi) seperti sikap malas, tidak memiliki keinginan berprestasi, fatalis, berorientasi ke masa lalu, dan tidak memiliki jiwa wirausaha (Sumodiningrat, 2003). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur politik, sosial, maupun ekonomi sehingga seseorang tidak dapat menjangkau sumber-sumber penghidupan yang tersedia (Sumodiningrat, 2003). Hal ini misalnya terjadi karena praktek monopoli dan oligopoli dalam bidang ekonomi. (Suharto, 1997).

Penyebab kurang berhasilnya Propinsi Lampung melaksanakan program penanggulangan kemiskinan adalah 1) Pemerintah Propinsi Lampung tidak memiliki data masyarakat miskin secara utuh sehingga tidak dapat dibuat *grand desain* penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan masalah di setiap wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi, dan 2) belum dilakukan reformasi birokrasi. Upaya-upaya pemerintah dalam menyeregakan penanggulangan kemiskinan menurut model tertentu berpotensi besar untuk gagal. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang data penduduk miskin yang akan menjadi pedoman penyusunan program serta dievaluasi kembali program yang selama ini dilaksanakan.

Untuk merumuskan model pemberdayaan yang komprehensif bagi masyarakat, terutama masyarakat petani miskin, diperlukan pemikiran

yang kompleks disertai pertimbangan multi dimensi. Kemiskinan tidak lagi dipandang secara stereotip atau seragam, karena setiap daerah dan spesifik sosio-budaya memiliki persoalan yang berbeda dan khas. Dengan demikian, untuk mengatasi kemiskinan masyarakat petani perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebab kemiskinan petani tersebut sehingga dapat dijadikan bahan dalam merumuskan model pemberdayaan masyarakat petani miskin yang sesuai dengan pola usahatani yang diusahakan.

Masyarakat miskin juga masih dijumpai di kalangan petani hortikultura di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Walaupun Kecamatan ini merupakan sentra produksi hortikultura di Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung, namun berdasarkan pengamatan pendahuluan yang telah dilakukan masih banyak petani hortikultura (Kubis dan Cabai) yang masih miskin dan belum berubah keadaannya sampai dengan saat penelitian ini dilakukan. Namun di lokasi ini akan didirikan Pusat Pasar Hasil Produksi Hortikultura pada tahun mendatang.

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini dilakukan untuk 1) mengidentifikasi tingkat dan penyebab kemiskinan petani hortikultura serta pola perilaku ekonomi petani dalam menghadapi kemiskinan, 2) mengkaji kinerja usaha ekonomi, lembaga keuangan, dan lembaga sosial petani hortikultura, dan 3) merumuskan model pemberdayaan petani hortikultura.

## BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di daerah sentra produksi hortikultura di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Penelitian dilakukan dari bulan Januari-November 2009. Responden penelitian adalah rumahtangga petani hortikultura yang miskin, berdasarkan ukuran yang ditetapkan BKKBN, yang berada di sentra produksi hortikultura. Responden dan jumlah responden ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* sampai pada taraf "*redunancy*". Berdasarkan teknik ini diperoleh jumlah rumahtangga responden sebanyak sembilan rumahtangga petani.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengamatan berpartisipasi, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Dalam pelaksanaan FGD, selain petani hortikultura miskin juga disertakan petani hortikultura yang tidak

miskin, petugas penyuluhan, tokoh masyarakat setempat, pengurus lembaga keuangan dan sosial petani hortikultura, dan pihak luar petani. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992), serta Analisis SWOT (Rangkuti, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi Budidaya Tanaman Hortikultura Cabai dan Kubis

Dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat petani hortikultura yang miskin di lokasi penelitian tampak bahwa sebenarnya potensi natural di lokasi penelitian ini tergolong baik. Potensi tersebut ditunjang pula oleh tanah dan iklim di lokasi yang mendukung pengembangan tanaman hortikultura.

Tabel 2. Luas panen dan produksi komoditas tanaman hortikultura di Pekon Campang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung, 2006

Jenis Tanaman	Luas (ha)	Produksi (t)
Bawang daun	15	60
Bawang merah	25	150
Buncis	34	320
Cabai	30	132
Kacang panjang	25	125
Kubis	43	464
Petsai/sawi	20	100
Terung	19	54

Selain itu, ketersediaan sarana transportasi yang memadai dan pasar hasil produksi pertanian yang tersedia juga merupakan potensi lingkungan yang baik untuk pengembangan hortikultura tersebut. Dengan demikian ditinjau dari aspek natural dan lingkungan, kedua aspek ini tidak merupakan pembatas dalam pengembangan hortikultura pada masa yang akan datang. Tabel 2 memperlihatkan luas panen dan produksi hortikultura di Pekon (Desa) Campang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2006.

### Faktor Penyebab Kemiskinan Petani Hortikultura

#### a. Aspek Struktural dan Pemilikan Aset

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, kemiskinan petani hortikultura di sentra hortikultura Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural dan budaya masyarakat setempat. Beberapa

penyebab faktor struktural di atas adalah masih terkungkungnya petani miskin oleh struktur sosial yang ada dan ketidakmampu petani miskin menembus struktur sosial tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah petani hortikultura yang miskin tidak dapat menghindar dari keterikatannya dengan pemilik modal/tengkulak untuk melaksanakan usahatani maupun memasarkan hasil produksi. Keterikatan ini tidak hanya dalam hal penyediaan biaya untuk proses produksi usahatani, tetapi juga berhubungan dengan daur hidup rumahtangga petani miskin tersebut. Keperluan untuk kesehatan, hajatan (perayaan, termasuk untuk pelaksanaan adat), dan lain-lain juga sering tergantung kepada pemilik modal/tengkulak tersebut.

Keterikatan petani kepada tengkulak dalam pelaksanaan usahatani tanaman hortikultura mulai dari pengolahan tanah sampai dengan pemasaran hasil produksi merupakan salah satu faktor penyebab petani hortikultura tidak mempunyai posisi tawar dengan pemilik modal maupun tengkulak pada saat memasarkan hasil produksi usahatani. Berbeda dengan petani hortikultura di Pulau Jawa, di sentra produksi hortikultura di Kecamatan Gisting sistem ijon tidak dijumpai. Dengan demikian kelemahan utama petani kubis di lokasi penelitian adalah tidak ada kekuatan petani untuk menentukan tingkat harga jual hasil produksi sehingga pendapatan usahatani yang diperoleh menjadi rendah. Rendahnya pendapatan usahatani ini menyebabkan dampak lebih lanjut yaitu ketidakmampuan untuk membayar pinjaman sehingga menyebabkan mereka tetap terikat kepada pemilik modal/tengkulak untuk periode-periode selanjutnya. Artinya, di satu pihak pemilik modal/tengkulak dapat membantu petani melalui pinjaman uang yang dapat dibayar pada saat panen, tetapi di pihak lain petani tidak mempunyai kebebasan memilih pasar hasil produksi. Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan Hadisapoetro (1978) dalam Mardikanto (1994) yang menyatakan bahwa petani kecil kurang mampu memasarkan produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa sebenarnya petani hortikultura memiliki kemampuan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya, namun karena keterikatan dengan tengkulak saat proses produksi dan selama daur hidup rumahtangganya menyebabkan petani tidak bebas dalam memasarkan hasil produksi tersebut.

Hambatan struktural yang lain adalah pemilikan luas lahan usahatani yang sempit (lebih kecil dari 0,5 ha), dan kesulitan mengakses modal dari sumber modal yang disediakan pemerintah

(bank). Oleh karena itu usaha mendekatkan sumber modal dan kemudahan mengaksesnya, penetapan harga dasar untuk produk hortikultura, kebebasan menjual hasil produksi usahatani hortikultura dan adanya pusat pasar hortikultura di lokasi tersebut serta dilakukan pendampingan dalam penggunaan modal yang diperoleh diharapkan dapat mengatasi hambatan struktural yang ada.

#### **b. Budaya**

Keterikatan petani kepada pemilik modal/tengkulak ternyata tidak terbatas hanya pada pelaksanaan proses produksi, tetapi juga untuk melakukan kegiatan hajatan, meminjam uang ketika sakit, melaksanakan kewajiban adat dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan petani dengan pemilik modal/tengkulak tidak terbatas pada hubungan bisnis dalam usahatani, tetapi telah berkembang menjadi hubungan “balas budi” dan saling tergantung antara keduanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa petani hanya bertindak sebagai “*price taker*” hasil produksinya. Biasanya harga hasil produksi yang diterima petani relatif rendah sehingga pendapatan usahatani yang diterima petani pun menjadi rendah.

Kewajiban sosial yang sampai saat ini masih dilakukan di lokasi penelitian adalah kegiatan adat sebagai tanda syukur atas hasil produksi yang diperoleh serta permohonan untuk dijauhkan dari marabahaya dan kesusahan “bersih pekon” (di Jawa Barat dikenal dengan istilah “bebersih desa”). Untuk pelaksanaan adat ini jumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat sangat besar untuk ukuran keadaan ekonomi rumahtangga mereka. Tingkat kemeriahan dan besarnya kegiatan tersebut menentukan kepuasan masyarakat dalam memenuhi kewajiban adatnya. Walaupun pelaksanaan adat tersebut secara ekonomi menimbulkan kesulitan baru. Selain itu, kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, “punjung-an”, dan lain-lain juga memerlukan biaya yang cukup besar yang juga banyak dipinjam dari pemilik modal. Oleh karena itu, kemampuan menabung petani hortikultura sangat rendah. Mengatasi kemiskinan petani hortikultura tidak cukup hanya dengan mengatasi hambatan struktural yang ada tetapi juga perlu mengurangi kewajiban-kewajiban adat yang memerlukan biaya sangat besar.

#### **c. Struktur Pasar**

Struktur pasar yang cenderung hanya dikuasai oleh beberapa orang dari pihak pemilik modal/tengkulak dan pihak luar juga menyebabkan tingkat harga kurang sesuai dengan harapan petani. Akibatnya tingkat pendapatan usahatani yang diperoleh petani

hortikultura menjadi rendah dan kemampuan petani mengembangkan jumlah tabungan rumahtangga dan modal menjadi relatif kecil.

Pendeknya rantai tataniaga hasil produksi pertanian tidak menjamin petani mendapatkan harga lebih tinggi. Tinggi rendahnya harga jual hasil produksi hortikultura di lokasi penelitian hanya ditentukan secara sepihak oleh pemilik modal/tengkulak karena posisinya yang kuat. Oleh karena itu hubungan *Patron-Client* (Bapak-anak angkat) pada masyarakat petani hortikultura berbeda dengan yang dijumpai pada masyarakat petani padi sawah. Hubungan *Patron-Client* pada petani hortikultura di lokasi penelitian cenderung melemahkan posisi petani hortikultura. Dengan demikian, walaupun memasarkan hasil produksi relatif mudah, petani hortikultura tidak mempunyai daya apapun untuk menentukan harga jual. Keadaan ini menyebabkan petani hortikultura tetap berada dalam kategori miskin dan sangat miskin

Keberadaan kelompok tani di lokasi penelitian dirasakan belum banyak membantu kebutuhan petani. Jika petani memerlukan dana untuk pemeliharaan tanaman yang diusahakan misalnya, maka salah satu cara yang cepat dan mudah adalah meminjam kepada pemilik modal/tengkulak, baik di desa yang bersangkutan maupun di daerah lain. Dengan demikian, salah satu cara untuk meningkatkan daya saing petani hortikultura adalah pembentukan pasar bersama atau lembaga ekonomi yang dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani dengan disertai peningkatan kemampuan kelompok tani tersebut dalam menembus pasar yang ada.

#### **d. Kelembagaan**

Lembaga ekonomi dan sosial di lokasi penelitian sebenarnya sudah cukup tersedia. Salah satu lembaga ekonomi yang tersedia di lokasi penelitian adalah pasar hasil produksi hortikultura, sedangkan lembaga sosial yang dijumpai antara lain kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Pasar hasil produksi hortikultura termasuk kubis dan cabai yang dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani sangat diperlukan agar petani dapat memperoleh tingkat harga layak dan sesuai pasar. Selain itu, pinjaman modal usahatani kepada petani dan kemudahan proses peminjaman juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan petani kepada tengkulak. Hal ini penting karena biaya usahatani yang diperlukan untuk tanaman hortikultura cukup tinggi dan resiko hama penyakit tanaman yang dapat menggagalkan usahatani mereka juga relatif tinggi.

Namun demikian tampaknya lembaga ekonomi di lokasi penelitian “belum memihak” kepada petani hortikultura, sedangkan lembaga sosial (kelompok tani/gabungan kelompok tani) yang ada pun belum dapat berfungsi secara optimal karena masih dalam posisi “lemah”.

Peningkatan pendapatan usahatani petani hortikultura dan taraf hidup tidak cukup hanya difasilitasi oleh modal dan pasar hasil produksi. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani harus berfungsi. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan dalam usahatani hortikultura harus ditingkatkan. Selama ini kebiasaan bertani hortikultura hanya didapatkan dari warisan orang tua.

#### **e. Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumberdaya manusia petani hortikultura di lokasi penelitian relatif masih rendah karena selain sebagian besar berpendidikan sekolah dasar (90 %), juga karena pola hidup konsumtif sehingga mereka sulit terlepas dari lingkaran kemiskinan. Selain itu sikap “pasrah” terhadap kondisi yang ada serta rendahnya motivasi mereka untuk mengubah kemiskinan juga merupakan penyebab belum terbebas dari kemiskinan. Pola hidup konsumtif yang masih banyak menyebabkan pendapatan yang tidak terlalu besar akan segera habis setelah panen sehingga kemampuan untuk menabung (modal) pun menjadi relatif sangat rendah. Kondisi seperti ini pada akhirnya membuat mereka sulit untuk lepas dari kemiskinan yang selama ini mereka alami.

Ditinjau dari aspek keamanan subsistensi dan solidaritas kehidupan masyarakat, kegiatan seperti “punjungan” dan “bersih pekon” di muka sebenarnya dapat merupakan katup pengaman dalam mengatasi keadaan rawan subsistensi petani (Scott, 1983). Kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan petani hortikultura ini sebenarnya mencerminkan “pola resiprositas” yang berlaku pada masyarakat petani. Namun pemilihan lahan usahatani yang relatif sempit di lokasi penelitian menyebabkan hasil produksi yang diperoleh juga rendah sehingga kewajiban-kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat memberatkan petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Ul Haq (1983) bahwa jika lembaga yang ada bersifat kaku dan kesempatan memperoleh alat produksi tidak rata terbagi, maka pertumbuhan (pembangunan) cenderung hanya menguntungkan “golongan atas” kecuali kalau lembaga yang ada dirombak besar-besaran. Untuk mengatasi kemiskinan petani hortikultura diperlukan model pendekatan yang menyeluruh dan tidak hanya menitikberatkan

pada mengatasi ketersediaan asset (lahan dan modal). Hambatan struktural dan budaya yang ada pada petani perlu diatasi dengan disertai peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan pola hidup, serta keterampilan petani dalam berusahatani melalui fungsi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dan menciptakan pasar yang memihak petani. Hal ini penting karena menurut Wolf (1981), di dalam kehidupannya, petani sangat tergantung kepada surplus-surplus dari hasil usahatani yang dilakukannya sehingga jika surplus tersebut tidak diperoleh, maka kehidupan petani akan tetap tidak berubah.

### **SIMPULAN**

Petani hortikultura di Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung berada pada tingkat miskin dan sangat miskin yang disebabkan oleh aspek struktural dan budaya. Penyebab spesifik kemiskinan adalah sempitnya lahan yang dimiliki, lembaga pemasaran hasil produksi yang dikuasai oleh pihak luar, keterbatasan modal, adat masyarakat setempat, ketergantungan pada tengkulak dan lembaga keuangan yang dikuasai pihak luar petani, kualitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah, dan pola hidup petani hortikultura yang konsumtif.

Perilaku ekonomi petani hortikultura dalam menghadapi kemiskinan yaitu dengan diversifikasi pekerjaan selain bertani dan melakukan pola resiprositas dengan anggota masyarakat yang lain. Model pemberdayaan petani hortikultura yang dianjurkan adalah peningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, kemudahan permodalan, pembentukan lembaga pemasaran yang ditentukan oleh pemerintah, pendampingan dan mengubah pola hidup serta sikap petani hortikultura.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS. 2006. Tingkat kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik No 47/IX/1September 2006.
- Mardikanto, T. 1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Miles, M and C Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publication, Thousand oaks, California. 346 pp
- Rangkuti, F. 2001. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia, Jakarta 200 hal
- Scott, J. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Penerbit LP3ES, Jakarta.

- Sumodiningrat, G. 2003. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah. Makalah disampaikan pada Rakerda Penanggulangan Kemiskinan di Ambon. Maluku, 5-6 September 2003.
- Suharto, E. 1997. Paradigma Baru Studi Kemiskinan. <http://mmugm.org>. (Diakses 15 September 2007)
- Soekartawi, 1996. Pembangunan Pertanian untuk Mengentaskan Kemiskinan. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ul Haq, M.1983. Tirai Kemiskinan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Wolf, E. 1981. Petani. Tinjauan Antropologi. Penerbit Rajawali. Jakarta.